

EFEKTIVITAS BIROKRASI PEMERINTAHAN SEBAGAI LEGALITAS PEMBANGUNAN DEMOKRASI

Rosa Arista Narendra

Program Studi Ilmu Politik - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email: rosa_aristanarendra@yahoo.com

ABSTRACT

The bureaucracy exists to bridge the aspects of politics, power and the public interest against the control of the Government in carrying out policies that have direct access with the people. The bureaucracy that has a bad image for the face of Government has always been a discussion of materials to take sides in realizing the reform of the bureaucracy in Indonesia. Bureaucratic reform is expected in an effort to consolidate democracy, where the holder of a democracy can be felt by the people literally. The bureaucracy that is not neutrality affects the joints in the life of the nation and the State, because of its success in bureaucratic neutrality will be legality as the main element in a democratic development. Democratic development will according, if the existence of the effectiveness and efficiency of the bureaucracy that seems to threaten against the mechanisms of making all the decisions.

Keywords: *Effectiveness, Bureaucracy, Government, Democracy*

ABSTRAK

Birokrasi hadir untuk menjembatani aspek politik, kekuasaan dan kepentingan publik terhadap kontrol pemerintahan dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang mempunyai akses langsung dengan rakyat. Birokrasi yang mempunyai citra buruk bagi wajah pemerintahan selalu menjadi bahan pembahasan tentang ketidaknetralitas dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Indonesia. Reformasi birokrasi diharapkan dalam upaya konsolidasi demokrasi, dimana pemegang demokrasi dapat dirasakan oleh rakyat secara harfiah. Birokrasi yang tidak netralitas akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan di dalam bangsa dan negara, karena keberhasilan dalam netralitas birokrasi akan melegalitaskan sebagai unsur utama dalam sebuah pembangunan demokrasi. Pembangunan demokrasi akan berjalan ideal, jika adanya efektivitas dan efisiensi dari sektor birokrasi yang seolah mengancam terhadap mekanisme pembuatan segala keputusan.

Kata-kata Kunci : Efektivitas, Birokrasi, Pemerintahan, Demokrasi

PENDAHULUAN

Berbicara tentang politik, kekuasaan, dan etika birokrasi dalam dinamika pemerintahan Indonesia dewasa ini bagaikan kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dan menjadikan kajian yang sangat menarik untuk dibahas, terutama dalam mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa. Kecenderungan yang timbul di kalangan birokrasi dari aparat dalam proses pelaksanaan tugasnya sering melanggar aturan main yang telah ditetapkan. Dalam hal ini posisi politik dan kekuasaan saling berpengaruh kuat terhadap penggeseran fungsi dan peran birokrasi selama ini. Birokrasi yang seharusnya bekerja melayani dan berpihak kepada rakyat berkembang menjadi melayani penguasa dengan keberpihakan pada politik dan kekuasaan. Dalam perkembangan ini seharusnya yang terjadi tentang etika birokrasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan aturan yang seharusnya dan semestinya, sehingga yang pantas untuk dilakukan dalam penerapan sebuah etika birokrasi tanpa memihak dan semuanya dilakukan untuk kepentingan umum atau publik bukan kepentingan pribadi.

Semenjak reformasi sampai dengan saat ini, masih adanya permasalahan di sekitar birokrasi yang sepenuhnya belum terlepas dari politik dan kekuasaan. Dalam halnya birokrasi, Islamy¹ menjelaskan di negara berkembang termasuk Indonesia cenderung patrimonialistik, yakni bersifat tidak efisien, tidak efektif, tidak obyektif, menjadi pemarah ketika berhadapan dengan control dan kritik, tidak mengabdikan kepada kepentingan umum, tidak lagi menjadi alat rakyat tetapi telah menjadi instrument penguasa dan sering tampil sebagai penguasa yang sangat otoritatif dan represif.

Almond dan Powell dalam Sularto-*Kompas* menjelaskan bahwasannya pembangunan politik secara khusus merujuk, pertama kepada peningkatan badan-badan eksekutif politik dan badan birokratik yang mampu menetapkan tujuan bersama dan melaksanakannya di dalam lingkungan dalam negeri dan luar negeri; kedua, berarti meningkatnya badan-badan yang secara luas melaksanakan fungsi artikulasi dan fungsi agregasi seperti partai politik, kelompok kepentingan, dan media komunikasi demi mengikat kelompok-kelompok di dalam masyarakat kepada

¹ Islamy dalam Mas'ud Said, *Birokrasi di Negara Birokratis*, 2012, UMM Press, hal. 44.

struktur-struktur yang berurusan dengan penetapan tujuan dan pencapaian tujuan tersebut.²

Menjadi permasalahan sekarang ini bagaimana proses penentuan etika dalam birokrasi itu sendiri, yang dapat dikatakan adanya krisis politik ketatanegaraan Indonesia juga masih menghadapi sekian banyak persoalan yang pada ujung-ujungnya menyangkut tentang kegagalan negara dalam melayani rakyat, karena awal terjadinya dampak dari sebuah buruknya pelayanan birokrasi kepada publik. Kondisi ini, semakin memaksa masyarakat untuk sibuk dalam mempertahankan kehidupannya mereka masing-masing. Dengan keadaan seperti ini dengan secara mudah, rakyat akan sendirinya mengabaikan perkembangan politik yang seharusnya juga menjadi perhatian mereka, karena dengan adanya politik dan kekuasaan itulah yang sebenarnya dapat mempengaruhi langsung atas kelayakan kehidupannya sebagai masyarakat yang mempunyai hak asasi manusia.

Dalam mengacu Negara modern dan demokrasi, keterlibatan politik massa mengubah negara menjadi 'demokrasi massa' ketika hak golongan oposisi diakui dan hak pilih umum diberikan. Stein Rokkan menekankan fakta bahwa restrukturisasi internal negara mengubah subyek negara menjadi warga negara, yang secara kolektif disebut 'massa atau rakyat'.³

Di Indonesia atau kebanyakan negara berkembang di Asia, baik karena kelemahan kelas menengah yang produktif atau preferensi ideologi kanan maupun kiri, birokrasi pemerintahan menjadi alat pembangunan yang utama⁴. Sebagai alat utama pembangunan, birokrasi memiliki posisi dan peran yang sangat strategis karena menguasai berbagai aspek hajat hidup masyarakat. Mulai dari urusan kelahiran, pernikahan, usaha, hingga urusan kematian, masyarakat tidak bisa menghindar dari urusan birokrasi.

Bahwasannya kenyataan yang kita inginkan jauh dari harapan kita, maka kita pasti akan timbul kekecewaan, begitulah yang terjadi ketika kita mengharap agar para aparatur birokrasi bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab, kejujuran dan keadilan dijunjung, sementara yang kenyataan yang terjadi mereka sama sekali tidak bermoral atau beretika, maka disitulah kita mengharap adanya aturan yang dapat

² Gabriel Almond dan Powell dalam Sularto – *Kompas*. Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi. 2001, hal. 6.

³ Newton dan Van Deth, *Perbandingan Sistem Politik; Teori dan Fakta*, 2016, Nusa Media, hal. 46.

⁴ Soedjatmoko, *Dimensi Manusia Dalam Pembangunan*, cetakan III, 1986, LP3ES, hal. 176.

ditegakkan yang menjadi norma atau rambu-rambu dalam melaksanakan tugasnya. Sesuatu yang kita inginkan itu adalah etika yang perlu diperhatikan oleh aparat birokrasi tersebut.

PERMASALAHAN

Di Indonesia, upaya melepas birokrasi dari pengaruh politik bukan lagi sekedar wacana. Pada masa kePresidenan Habibie, telah dikeluarkan PP No.5 Tahun 1999 yang menekankan bahwa PNS harus netral dari partai politik. Meskipun usaha itu merupakan langkah maju, namun belum mampu mewujudkan birokrasi yang netral dan independen mengingat birokrasi di Indonesia belum lepas dari pengaruh pemerintah (eksekutif) yang merupakan kekuasaan politik. Dalam konteks Indonesia, aspek kenegaraan dan pemerintahan seringkali tidak jelas. Jika pemerintah dipahami sebagai jabatan politis (Presiden, Menteri, Kepala Daerah dan jabatan kenegaraan yang ditetapkan secara politis) dan aparat pemerintah (instansi negara yang diisi oleh jabatan karir, misalnya PNS) dalam kerangka trias politika, maka pembagian kekuasaan di wilayah eksekutif Indonesia bisa digambarkan campur aduknya birokrasi negara dan birokrasi pemerintah membuat birokrasi di Indonesia tak pernah benar-benar netral. Pemerintah, yang seharusnya menjadi pejabat politik, memiliki kekuasaan yang sangat besar terhadap birokrasi. Bahkan, pengaruh pemerintah (eksekutif) menjangkau hampir seluruh lembaga negara karena seluruh lembaga negara (legislatif, yudikatif dan lembaga lain yang dibentuk atas dasar konstitusi) terdapat unsur birokrasi (melalui sekretariat jenderal). Pada posisi ini, pengaruh pemerintah sangat dominan dan merancukan konsep trias politika dimana masing-masing lembaga negara seharusnya saling independen antara satu dengan yang lainnya⁵.

Belakangan ini netralitas birokrasi didengungkan sebagai upaya pemberdayaan maupun bagian dari reformasi birokrasi pemerintahan. Namun, itu sulit terwujud dalam kenyataannya. Konteksnya adalah besarnya kepentingan atau bahkan kebocoran anggaran birokrasi pemerintahan, yang perkiraan kasarnya minimal mencapai 30% setiap tahun. Dalam hal ini penekanan terhadap politisasi birokrasi pemerintahan, terutama tarik-menarik pengaruh partai-partai politik berkuasa untuk menempatkan orangnya pada posisi-posisi strategis guna menguasai sumber dana.

⁵ Pipit R. Kartawijaya, *Pemerintah Bukanlah Negara*, Studi Komparasi Administrasi Pemerintahan RI Dengan Negara Jerman, Henk Publishing, 2006, h 17.

Patut diingat, birokrasi pemerintahan merupakan suatu kekuatan yang besar sekali, sebab kegiatannya menyentuh setiap kehidupan manusia. Maka kebijaksanaan yang dibuat oleh birokrasi sangat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Awalnya, manusia yang hidup dalam suatu negara tertentu terpaksa menerima suatu kebijaksanaan yang telah dibuat oleh birokrasi. Untuk itu, negara kita sering disebut *bureaucratic polity*⁶.

Dalam menuju reformasi birokrasi, reformasi birokrasi di negara kita sesungguhnya harus dilihat dalam kerangka teoretik dan empirik yang luas, mencakup penguatan masyarakat sipil, supremasi hukum, strategi pembangunan ekonomi dan pembangunan politik yang saling terkait dan mempengaruhi. Dengan demikian, reformasi birokrasi juga merupakan bagian tak terpisahkan dalam upaya konsolidasi demokrasi kita saat ini. Namun, kita harus akui bahwa peralihan dari sistem otoritarian ke sistem demokratik dewasa ini merupakan periode yang amat sulit bagi proses reformasi birokrasi. Apalagi, kalau dikatakan dengan kualitas birokrasi pemerintahan maupun realisasi otonomi daerah serta sangat sulitnya pengurangan sistematis korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pada birokrasi pemerintahan yang diperkirakan semakin sistemik dan merata ke daerah-daerah⁷.

Birokrasi menguasai akses ke sumber daya alam, anggaran, pegawai, proyek-proyek, serta menguasai akses pengetahuan dan informasi yang tidak dimiliki pihak lain. Birokrasi juga memegang peranan penting dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai kebijakan publik, termasuk evaluasi kinerjanya. Memegang menjadi pertimbangan apabila pada setiap perkembangan politik, selalu terdapat upaya menarik birokrasi pada lingkungan permainan politik. Birokrasi tidak lain hanya dimanfaatkan untuk mencapai, mempertahankan kekuasaan oleh partai tertentu atau pihak dalam pemegang kekuasaan. Meski demikian tentang birokrasi di Indonesia sepertinya tidak pernah berubah dalam hal pelayanan terhadap publik. Dari dulu belum ada perubahan yang berarti. Birokrasi tetap diliputi berbagai kepentingan dalam praktik penyimpangan dan kurangnya efisiensi. Sampai sekarang birokrasi dalam banyak hal masih menunjukkan buruknya sistem dan kinerja yang ada.

Permasalahan tersebut adalah masalah yang paling dekat dan bersinggungan langsung dengan kehidupan langsung dengan kehidupan masyarakat. Harapan yang muncul dari hasil analisis permasalahan pelayanan publik yang ternyata banyak

⁶ Didin S. Damanhuri, *Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia*, Jakarta: FEUI, 2006, h 14.

⁷ *Ibid.*, h. 12.

dikeluhkan oleh masyarakat, yaitu adanya mekanisme komplain dan partisipasi publik dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik yang oleh negara. Karena selama ini tidak ada regulasi yang mengatur mekanisme komplain yang seharusnya menjadi hak publik manakala dirugikan atau menjadi korban ketidakberesan pelayanan. Situasi ini semakin parah, karena posisi publik hanyalah dijadikan objek dalam sistem pelayanan publik. Kondisi ini dapat dikatakan sebagai “kekalahan publik” sebagai pemilik sah atas negara (daulat rakyat), karena tidak adanya ruang akses bagi publik untuk mendapatkan informasi secara mendetail tentang apa yang berkenaan dengan pelayanan publik⁸.

Pelayanan publik menjadi acuan utama terhadap efektiv tidaknya birokrasi dalam keterkaitannya dalam pembangunan demokrasi sebuah bangsa. Dengan alasan politik, legalitas efektivitas birokrasi bisa meningkatkan pembangunan demokrasi yang akan menyediakan lingkungan politik yang stabil dan basis sebagai legitimasi terhadap pemerintah yang kuat seringkali juga merupakan sebuah pemerintah yang demokratis.

PEMBAHASAN

Terbentuknya etika birokrasi tidak terlepas dari kondisi yang ada di dalam masyarakat yang bersangkutan, sesuai dengan aturan, norma, kebiasaan atau budaya di tengah-tengah masyarakat dalam suatu komunitas tertentu. Nilai-nilai yang ada dan berkembang di dalam masyarakat mewarnai sikap dan perilaku yang nantinya dipandang etis atau tidak etis dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan yang merupakan bagian dari fungsi aparat birokrasi itu sendiri.

Di negara kita dalam kondisi birokrasi yang seperti ini, penetapan etika bagi aparat birokrasi atau penyelenggara pemerintahan hampir sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Dimana pemerintah yang menjalankan birokrasi merasa paling berkuasa dan merasa yang memiliki kewenangan untuk menentukan sesuatu itu layak atau tidak bagi dirinya menurut anggapan pandangannya sendiri, tanpa mempedulikan kesejahteraan di dalam masyarakat.

Reformasi birokrasi sendiri memang sebuah proses dan tuntutan yang tidak bisa ditunda lagi, sebab birokrasi pada hakekatnya adalah mesin negara yang berfungsi menjalankan seluruh tugas pemerintahan dan pembangunan dalam rangka merealisasikan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam konstitusi negara.

⁸ Luthfi J. Kurniawan, *Negara, Civil Society dan Demokratisasi*, Malang: In-Trans Publishing, 2008, h. 106.

Demikian juga dengan gerakan reformasi birokrasi di Indonesia, pada hakikatnya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sesungguhnya, perjalanan reformasi birokrasi di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1980-an. Terminologi "reformasi birokrasi" kala itu dikenal dengan istilah reformasi administrasi negara yaitu sebuah istilah dengan cakupan domain yang sangat luas, mulai dari domain politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya hingga pertahanan dan keamanan, selain mulai dari badan legislatif, eksekutif, hingga yudikatif. Oleh karena itu sesungguhnya reformasi birokrasi di Indonesia bukanlah suatu fenomena yang baru. Namun persoalan yang muncul adalah gerakan reformasi yang selama ini dilakukan belum juga membawa hasil yang memadai. Selama masa pemerintahan Orde Baru para birokrat memiliki posisi penting tetapi berada dalam sebuah sistem yang relatif tertutup. Birokrasi sangat dominan dalam memformulasikan, menjalankan, dan mengevaluasi kebijakan publik. Akibatnya aparat birokrasi yang diharapkan dapat memecahkan masalah justru menjadi penyebab masalah baru. Dalam sistem yang relatif otoriter tersebut pada gilirannya rakyat gagal melakukan proses *check and balance* terhadap hak prerogatif dan kebijakan yang dijalankan oleh penguasa⁹.

Birokrasi didefinisikan sebagai organisasi yang terdiri dari aparat bergaji yang melaksanakan detail tugas pemerintah, memberikan nasihat dan melaksanakan keputusan kebijakan (*the beaucracy consists of salaried officials who conduct the detailed business of government, advising and applying policy decisions*¹⁰). Berkenaan dengan pendapat di atas, Weber dalam Krieken mendefinisikan birokrasi sebagai organisasi dengan sebuah hierarki penggajian, pejabat tetap atau penuh waktu yang menyusun rantai komando (*organizations with of hierarchy of paid, full-time officials who formed a chain of command*)¹¹. Dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa birokrasi merupakan sebuah organisasi yang tersusun secara hirarki yang memiliki pembagian kerja yang jelas dan terdiri dari orang-orang yang profesional yang direkrut pemerintah dan digaji untuk membantu penyelenggaraan tugas pemerintah.

⁹ Retno Sunu Astuti, *FORUM-Pemerintahan SBY dan Penanganan Korupsi*, Semarang: Fisip, 2007, h. 41.

¹⁰ Hague, Harrop & Breslin : *Comparative Government and Politics*, MACMILLAN Press, London, 1998, hal. 219

¹¹ Krieken, dalam Budi Setiyono : *Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi*, Pusat kajian Otda dan Kebijakan Publik, FISIP UNDIP, 2005, hal. 22

Penilaian birokrasi tidak hanya ditandai dengan menggunakan indikator-indikator yang melekat pada birokrasi seperti efektivitas dan efisiensi, tetapi juga harus dilihat juga dari indikator pengguna jasa, akuntabilitas dan responsivitas. Penilaian kinerja birokrasi dari sisi pengguna jasa sangat penting karena birokrasi publik seringkali memiliki kewenangan monopolis, sehingga para pengguna jasa tidak memiliki alternatif sumber pelayanan. Untuk mengatasi hal tersebut maka pelayanan yang diberikan oleh birokrasi publik harus dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pelanggannya. Selain itu, birokrasi harus memiliki tujuan dan misi yang jelas dan terukur.

Perubahan terhadap birokrasi diupayakan dengan mengembangkan kultur birokrasi yang rasional dan egaliter. Maksudnya adalah bagaimana birokrasi tidak lagi mengendalikan budaya petunjuk dari atasan, melainkan mampu menguasai dan memanfaatkan pengetahuan dan teknologi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya dalam menekankan perwujudan komunikasi antara pemimpin dengan yang dipimpinnya. Pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk memengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Dalam kegiatannya bahwa pemimpin memiliki kekuasaan untuk mengerahkan dan mempengaruhi bawahannya sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Pada tahap pemberian tugas pemimpin harus memberikan suara arahan dan bimbingan yang jelas, agar bawahan dalam melaksanakan tugasnya dapat dengan mudah dan hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan anggotanya. Pemimpin mempunyai wewenang untuk mengarahkan anggota dan juga dapat memberikan pengaruh, dengan kata lain para pemimpin tidak hanya dapat memerintah bawahan apa yang harus dilakukan, tetapi juga dapat mempengaruhi bagaimana bawahan melaksanakan perintahnya.

Terjalannya suatu hubungan sosial yang saling berinteraksi antara pemimpin dengan bawahan, yang akhirnya terjadi suatu hubungan timbal balik. Oleh sebab itu bahwa pemimpin diharapkan memiliki kemampuan dalam menjalankan kepemimpinannya, karena apabila tidak memiliki kemampuan untuk memimpin, maka tujuan yang ingin dicapai tidak akan dapat tercapai secara maksimal. Birokrasi di Indonesia dalam konteks Pemerintahan Indonesia, dikatakan bahwa birokrasi dalam sistem pemerintahan tentang kinerja pemerintahan. Bagi kalangan akademik, biasanya

baik atau buruknya sebuah pemerintahan dapat dilihat dari seberapa jauh performa birokrasi. Karena istilah birokrasi yang ada pada dasarnya berkonotasi netral¹².

Birokrasi yang berkembang di Indonesia saat ini, di satu sisi digambarkan sebagai organisasi yang tidak efisien dan tidak efektif serta berbelit-belit. Sebuah gambaran yang membuat kita menjadi tidak simpati dan tidak mempunyai tanggapan positif serta takut untuk berhubungan dengan birokrasi. Di sisi lain, birokrasi digambarkan sebagai organisasi dimana bisa meraih segalanya bagi siapa saja pemenang sebuah pemilihan, mulai dari uang, jabatan, dan kekuasaan. Dua gambaran yang kontradiktif, karena gambaran pertama disampaikan oleh masyarakat bawah dan gambaran kedua disampaikan oleh penguasa elit¹³.

Pada dasarnya birokrasi lahir sebagai produk dari sebuah proses sosial yang panjang dan kompleks yaitu dari serangkaian prosedur yang berliku dan menyangkut kontekstualitas sosial yang universal dan dijelaskan bahwa manusia sebagai individu sekaligus sebagai makhluk sosial jelas tidak mungkin bisa hidup sendiri. Manusia pasti membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan juga agar bisa tetap eksis. Ketika individu-individu tersebut ternyata mempunyai kepentingan dan kebutuhan yang sama, maka mereka berkomitmen untuk membentuk sebuah komunitas sosial yang selanjutnya komunitas sosial ini disebut negara. Sehingga negara pemerintahan dibentuk berdasar pada kontrak sosial, dimana pada kontrak ini negara diberi kuasa untuk mempunyai beberapa kesejahteraan dan pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan¹⁴.

Upaya kepemimpinan dalam mengembangkan pemerintahan yang baik di Indonesia juga menjadi sebuah tuntutan yang nyata, bukan hanya karena adanya tekanan dari sebuah keadaan yang harus menjadikan sebuah permasalahan tanpa adanya penyelesaian tetapi semua ada jalan keluar dalam menghadapi permasalahan pemerintahan di bidang birokrasi. Upaya ini tentu bukan suatu pekerjaan yang mudah, terutama karena adanya pihak-pihak yang masih ingin terus mempertahankan adanya politisasi birokrasi di Indonesia. Namun demikian nampaknya tidak sedikit pula yang tidak keberatan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik yaitu pada awalnya dimulai pada suatu kepemimpinan yang efektif mampu menjadi contoh bagi

¹² M. Mas'ud Said, *Birokrasi Di Negara Birokratis*, Malang: UMM, 2007, h. 115.

¹³ Rina Martini, *Jurnal Ilmu Politik-Politisasi Birokrasi Di Indonesia*, Semarang: Prodi MIP, 2010, h. 67.

¹⁴ Budi Setyono dalam Rina Martini, *Jurnal Ilmu Politik-Politisasi Birokrasi Di Indonesia*, Semarang: Prodi MIP, 2010, h. 68.

masyarakat yang dipimpinnya dalam suatu usaha dan tuntutan penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di kualitas sumberdaya birokrasi.

Terlepas dari kenyataan bahwa korupsi merupakan masalah universal dan menjadi perhatian utama dalam sosiologi dan bisa mengarah menjadikan konflik sosial. Secara umum, korupsi biasanya digambarkan sebagai perilaku yang melibatkan penyalahgunaan jabatan publik atau sumber-sumber kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Dengan kata lain, sistem akuntabilitas yang efektif, yang dapat menciptakan iklim yang baik bagi de-eskalasi korupsi, belum ada. Rantai akuntabilitas antara legislatif, eksekutif, dan penyedia layanan juga terhalang karena kegagalan politisi untuk menyampaikan tujuan pengembangan kinerja yang harmonis dengan kementerian dan penyedia layanan. Sementara itu, akibat ketidakpastian politik, seperti perhatian mereka pada kepentingan jangka pendek daripada isu-isu jangka panjang. Melihat realita itu, mengatasi korupsi dalam transisi-negara berkembang merupakan tantangan yang kompleks dan multidimensi. Akhir sebuah rezim otoriter bukanlah satu-satunya obat mujarab untuk mengatasi masalah. Walau hal ini sangat perlu dan penting, sejumlah inisiatif untuk menjadikan demokrasi efektif mencegah korupsi perlu dilakukan¹⁵.

Melihat besarnya pengaruh pemerintah terhadap birokrasi yang terus berlangsung hingga sekarang, maka penting untuk mengartikulasikan kembali tuntutan netralisasi birokrasi, bahwa birokrasi harus lepas dari pengaruh pemerintah, birokrasi harus independen dan bekerja dalam kaidah-kaidah profesional. Birokrasi harus lepas dari pengaruh kekuasaan dan memposisikan dirinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dan bukan abdi pemerintah. Sebagai abdi negara, birokrasi harus fokus pada tugas-tugas kenegaraan yang dibebankan kepadanya sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan.

KESIMPULAN

Korupsi dan aspek KKN di Indonesia oleh banyak kalangan dinilai sebagai kondisi yang sangat membahayakan bagi eksistensinya bangsa yang beradab. Hal ini dikarenakan tindakan korupsi telah begitu melembaga bukan hanya di kalangan eksekutif, akan tetapi juga di kalangan legislatif, yudikatif, bahkan juga di kalangan masyarakat luas. Penanganan korupsi memang bukan persoalan yang mudah, terlebih

¹⁵ Budi Setiyono, *Korupsi, Jurnal Ilmu Politik-Transisi Demokrasi & Peran Organisasi Civil Society*, Semarang: Prodi MIP, 2010, h. 5-11.

korupsi yang terjadi birokrasi pemerintahan. Meskipun sampai saat ini mekanisme hukum telah berjalan sesuai ketentuan. Namun hasilnya dalam penanganan korupsi belum bisa dikatakan optimal.

Maka dalam berupaya meminimalisasikan korupsi dan aspek KKN harus didatangkan jiwa kepemimpinan yang efektif untuk menjadikan birokrasi yang efektif, yang pada hakikatnya merupakan seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan yang bersih dari sifat KKN. Dalam kegiatannya bahwa pemimpin memiliki kekuasaan untuk mengerahkan dan mempengaruhi bawahannya sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan.

Salah satu gagasan untuk mengembalikan peran birokrasi dalam fungsinya yang ideal adalah dengan mendorong netralisasi birokrasi. Netralisasi birokrasi berarti menempatkan posisi birokrasi pada wilayah yang seharusnya, yakni sebagai alat negara yang menjalankan tugas-tugas kenegaraan, serta menjadikan efektivitas birokrasi pemerintahan sebagai legalitas pembangunan demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Soedjatmoko. 1986. *Dimensi Manusia Dalam Pembangunan*. Jakarta: Cetakan III. LP3ES
- Pipit R. Kartawijaya. 2006. *Pemerintah Bukanlah Negara, Studi Komparasi Administrasi Pemerintahan RI Dengan Negara Jerman*. Henk Publishing.
- Damanhuri, Didin S. 2006. *Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia*, Jakarta: FEUI.
- Kurniawan Luthfi J. 2008. *Negara, Civil Society dan Demokratisasi*, Malang: In-Trans Publishing.
- Astuti, Retno Sunu. 2007. *FORUM-Pemerintahan SBY dan Penanganan Korupsi*, Semarang: Fisip.
- Hague, Harrop & Breslin. 1998. *Comparative Government and Politics*, MACMILLAN Press, London.
- Setiyono, Budi. 2005. *Birokrasi dalam Perspekti Politik dan Administrasi*, Pusat kajian Otda dan Kebijakan Public, FISIP UNDIP.

- M. Mas'ud Said. 2007. *Birokrasi Di Negara Birokratis*, Malang: UMM.
- Martini, Rina. 2010. *Jurnal Ilmu Politik-Politisasi Birokrasi Di Indonesia*, Semarang: Prodi MIP.
- Setiyono, Budi. 2010. *Korupsi, Jurnal Ilmu Politik-Transisi Demokrasi & Peran Organisasi Civil Society*, Semarang: Prodi MIP.
- Newton, Kenneth dan Jan W. Van Deth. 2016. *Perbandingan Sistem Politik ; Teori dan Fakta*. Bandung. Nusa Media.
- Sularto. 2001. *Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi*. Jakarta: Kompas.